



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LKIP 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH
Manggarai Regu Adil dan Berkeadilan



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021 dapat disusun dan selesai tepat waktu.

Penyusunan LKIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Manggarai. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Manggarai yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ini sangat

kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021 ini menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Ruteng, 15 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH,

DRS. JAHANG FANSI ALDUS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650726 199011 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai telah bekerja di atas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Di samping itu, dalam rangka evaluasi, harus disiapkan juga indikator-indikator sebagai barometer untuk menilai capaian sasaran seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021 serta dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Dalam dokumen RENSTRA, IKU dan Perjanjian Kinerja telah ditetapkan 9 sasaran dengan 25 indikator sasaran.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut ini :

NO.	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI/MAKNA
1.	≥ 100	Memuaskan
2.	$85 \leq 99$	Sangat Baik
3.	$70 \leq 84$	Baik
4.	$50 \leq 69$	Cukup
5.	< 50	Kurang

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran tahun 2021 yang juga merupakan capaian kinerja akhir periode perencanaan 2016-2021 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Capaian									
				Memuaskan ($\geq 100\%$)		Sangat Baik ($85 \leq 99$)		Baik ($70 \leq 84$)		Cukup ($50 \leq 69$)		Kurang (< 50)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Sasaran 1	3	109,31	2	66,67	0	0,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00
2	Sasaran 2	6	104,07	6	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

3	Sasaran 3	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Sasaran 4	3	97,13	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Sasaran 5	2	94,70	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00
6	Sasaran 6	2	95,95	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Sasaran 7	2	146,91	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Sasaran 8	3	78,77	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	66,67
9	Sasaran 9	3	66,29	1	33,33	0	0,00	0	0,00	1	33,33	1	33,33
Jlh	9 Sasaran	25	99,24	14	56,00	5	20,00	2	8,00	1	4,00	3	12,00

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, rata-rata capaian kinerja dari 9 (sembilan) sasaran adalah 99,24% kategori SANGAT BAIK. Ke-9 sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) indikator. Dari 25 (dua puluh lima) indikator, terdapat 14 indikator atau 56,00% kategori MEMUASKAN, 5 (lima) indikator atau 20,00% kategori SANGAT BAIK, 2 (dua) indikator (8,00%) kategori BAIK, 1 (satu) indikator (4,00%) kategori CUKUP dan 3 (tiga) indikator (12,00%) kategori KURANG.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021, maka ditetapkan anggaran yang tersebar di 3 (tiga) program dan beberapa kegiatan/sub kegiatan strategis sebesar Rp.14.880.096.338,00 dengan penyerapan Rp.14.600.224.453,00 atau 98,12%.

Bila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran 99,24% menunjukkan adanya efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,12%.

15 Maret 2022

 Drs. JAHANG FANDI ALDUS
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19650726 199011 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sumber Daya Manusia Aparatur.....	5
E. Sistematika Penulisan LKIP.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Strategis 2016-2021	10
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
3.3 Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Manggarai	61
3.3.1 Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis	61
BAB IV PENUTUP.....	65
LAMPIRAN :	
1. RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021	
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021	
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021	
4. REALISASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2021	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen agar penyelenggaraan roda pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektivitas. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Karenanya, Sekretariat Daerah (SETDA) sebagai unsur staf yang berfungsi membantu Bupati dalam merumuskan berbagai kebijakan, harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaan kinerja akan menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan. Penyusunan LKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pencapaian kinerja yang baik harus bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang tepat, jelas dan terukur agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik KKN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2021. Dalam LKIP akan disampaikan capaian kinerja dari masing-masing sasaran yang ditakar dengan menggunakan indikatornya masing-masing. Fokus pembenahan KIP Sekretariat Daerah pada 5 (lima) komponen kinerja yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja serta capaian kinerja. LKIP Sekretariat Daerah tahun 2021 juga merupakan pertanggungjawaban kinerja kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai adalah **MEMBANTU BUPATI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI SERTA PELAYANAN ADMINISTRATIF**. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten. Dan ketiga Asisten itu dibantu oleh 9 (Sembilan) Kepala Bagian dan masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan atau Jabatan Fungsional. Struktur organisasinya dapat dilihat pada uraian berikutnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Struktur Organisasinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai. Susunan organisasinya sebagai berikut :

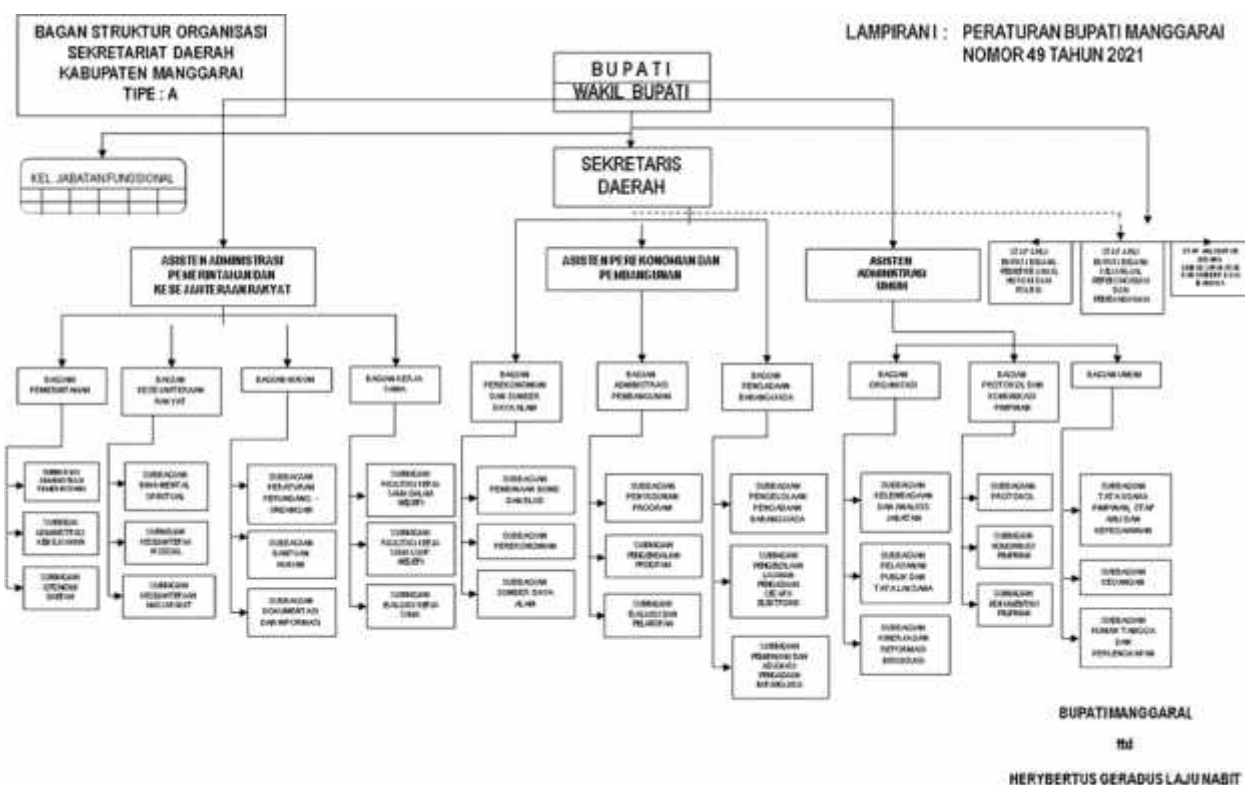
- Sekretaris Daerah
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 4 Bagian yaitu:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Subbagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b. Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perundang-Undangan;
 - b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

4. Bagian Kerja Sama, terdiri atas :
 - a. Subbagian Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri;
 - b. Subbagian Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri; dan
 - c. Subbagian Evaluasi Kerja Sama.
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 Bagian yaitu:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 - a. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b. Subbagian Perekonomian; dan
 - c. Subbagian Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas :
 - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- Asisten Administrasi Umum membawahi 3 Bagian yaitu:
 1. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi, terdiri atas :
 - a. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
 - a. Subbagian Protokol;
 - b. Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c. Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

Selain jabatan struktural tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) jabatan struktural lain yang bersifat koordinasi yaitu :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Perekonomian dan Pembangunan;
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Struktur Organisasi Setda Kab. Manggarai



D. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Berdasarkan Struktur Organisasi, jabatan struktural berjumlah sebanyak 39 jabatan, dengan rincian :

1. Sekretaris Daerah, Eselon II-A : 1 orang
2. Staf Ahli Bupati, Eselon II-B : 3 orang
2. Asisten Sekda, Eselon II-B : 3 orang
3. Kepala Bagian, Eselon III-A : 10 orang
4. Kepala Sub Bagian, Eselon IV-A : 30 orang

Berdasarkan struktur di atas jumlah jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai berjumlah 40 jabatan dengan rincian jabatan administrator (eselon III) berjumlah 10 orang, jabatan pengawas (eselon IV) berjumlah 30 orang, namun setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat rekomendasi tentang persetujuan penyetaraan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai, maka Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan yang masih dalam jabatan pengawas atau Kepala Sub Bagian sebanyak 5 (lima) orang, yaitu 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahi dan Kepegawaian, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Protokol dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian di Bagian Kerja Sama yang merupakan bagian baru hasil penataan kelembagaan tahun 2021.

Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai berjumlah 153 orang, dengan rincian tenaga honorer berjumlah 50 orang dan PNS berjumlah 103 dengan komposisi sesuai pangkat/golongan dan pendidikan sebagai berikut ini:

a. Data Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Golongan																Tanaga Honorer	Jml
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d		
1.	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Staf Ahli Bupati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
a.	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	2	2	-	-	-	-	-	10
b.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	1	-	-	2	9
c.	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	2	7
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
a.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	9
b.	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	2	-	1	-	-	1	10
c.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	-	1	-	-	-	9
5.	Asisten Administrasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
a.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	3	-	1	-	-	-	4	16
b.	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	2	1	1	-	-	-	11
c.	Bagian Umum	-	-	-	-	3	5	5	4	5	3	2	1	-	1	-	-	43	72
Total		0	0	0	1	4	11	11	15	16	9	16	10	2	6	5	1	53	160

b. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan												Jumlah
		Pegawai Negeri Sipil						Tenaga Honorer						
		SD	SMP	SMA	D2-D3	S1	S2	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	Staf Ahli Bupati	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
a.	Bagian Pemerintahan	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10
b.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	4	0	3	0	0	1	1	0	0	0	9
c.	Bagian Hukum	0	0	1	0	4	0	0	1	0	0	1	0	7
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
a.	Bagian Perekonomian dan SDA	0	1	5	1	1	0	0	0	1	0	0	0	9
b.	Bagian Adm. Pembangunan	0	1	4	0	5	0	0	0	1	0	0	0	11
c.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0	0	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	9
5.	Asisten Administrasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	3	2	6	1	0	0	2	0	2	0	16
b.	Bagian Organisasi	0	0	2	1	6	2	0	0	0	0	0	0	11
c.	Bagian Umum	0	3	18	4	4	0	2	0	28	5	8	0	72
Total		0	5	43	9	46	4	2	2	33	5	11	0	160

E. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sistematika penulisan LKIP ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Setda, komposisi sumber daya manusia aparatur dan sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini akan dijelaskan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Tahun 2021 yang terdiri atas Rencana Strategis (RENSTRA) Setda Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan diuraikan analisis capaian kinerja tahun 2021. Capaian kinerja akan tergambar dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan target, realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun sebelumnya apabila sasaran dan indikatornya masih sama dan realisasi tahun 2021.

Bab IV Penutup

Pada bagian penutup akan disajikan simpulan menyeluruh yang disertai dengan beberapa rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2016-2021

1. VISI

Terdepan Dalam Pemberian Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
Manggarai dan Aparatur Pemerintahan

2. MISI

1. Melaksanakan administrasi pemerintahan yang professional, akuntabel dan transparan.
2. Melaksanakan administrasi pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan pengembangan kelembagaan organisasi masyarakat setempat.
4. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggerakkan seluruh potensi pembangunan menjadi kekuatan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai/diubah. Perubahan kondisi itu dapat berupa penurunan dan juga peningkatan. Tujuan merupakan kinerja yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata lain tujuan mempertajam misi organisasi. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas pembangunan. Di atas prioritas itulah semua program dan kegiatan serta alokasi anggaran diarahkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Dengan kata lain sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya penegakkan Supremasi Hukum dan HAM dan pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	Terwujudnya penegakkan supremasi hukum dan HAM dan pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah
Menciptakan administrasi pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparansi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah
	Terwujudnya penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Melaksanakan administrasi pembangunan bidang program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan
Meningkatnya peranserta pemuda dalam pembangunan daerah	Terwujudnya organisasi pemuda yang partisipatif
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat Raskin	Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat penerima manfaat Raskin
Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflansi	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflansi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pelayanan dalam bidang kemasyara-katan	Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan IKU berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Setda Kabupaten Manggarai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: Organ.065/88.a/VII/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : Organ.065/483.a/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: Organ.065/88.a/VII/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebelum dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
sebelum dan sesudah perubahan
Tahun 2016-2021

Sasaran		Indikator	
1	Terwujudnya penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	1.	Persentase Kasus Bantuan Hukum yang tertangani
		2.	Jumlah Desa Sadar Hukum
		3.	Jumlah produk hukum yang ditetapkan: 1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Bupati 3. Keputusan Bupati 4. Instruksi Bupati
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah	1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Laporan Kinerja
		2.	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sampel
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun LKPj dan LPPD
		4.	Persentase penataan wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		5.	Jumlah kecamatan yang mengadminis-trasikan pembakuan nama rupa bumi Kab. Manggarai
		6.	Presentase konflik masyarakat yang difasilitasi penyelesaiannya

3.	Terwujudnya penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	1.	Persentase Perangkat Daerah yang Kelembagaannya telah sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan	1.	Persentase proyek yang diselesaikan tepat waktu
		2.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan adm. pembangunan dengan baik
		3.	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu
5.	Terwujudnya organisasi pemuda yang partisipatif	1.	Jumlah organisasi pemuda yang dibina
		2.	Jumlah organisasi olahraga yang dibina
6.	Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat penerima manfaat Raskin	1.	Koordinasi pelaksanaan penyaluran Raskin bagi RTSPM di 171 Desa/Kel.
		2.	Jumlah pagu beras
7.	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflansi	1.	Cakupan wilayah pengawasan peredaran barang dan jasa
		2.	Laju inflasi
8.	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	1.	Cakupan upaya peningkatan kesehatan masyarakat
		2.	Jumlah KIS yang diterbitkan
		3.	Cakupan pelayanan bidang keagamaan
9.	Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan	1.	Jumlah Dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat
		2.	Jumlah aparat kehumasan dan keprotokolan yang mendukung pelayanan bidang kemasyarakatan
		3.	Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah : - Media Massa - Media cetak dan media luar ruangan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari bupati kepada pimpinan Setda untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan Setda bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk

menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja tersebut juga mencakup kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai impact dari program dan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan berkesinambungan (*by design and sustainable*). Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2020 yang disajikan disini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2020. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan dimungkinkan menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Sedangkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tetap mengikuti target yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai

tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2020 dimaksud, sebagai berikut :

Tabel 2.3

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	1.1	Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	100 %
		1.2	Jumlah Desa Sadar Hukum	1 Desa
		1.3	Jumlah produk hukum yang ditetapkan :	340 Produk
			1. Peraturan Daerah	15 Perda
			2. Peraturan Bupati	20 Perbub
			3. Keputusan Bupati	300 SK
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah	4. Instruksi Bupati		5 Inst
		2.1	Persentase PD yang telah menyusun Laporan Kinerja	100 %
		2.2	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP PD sampel	60 (B) Kategori
		2.3	Persentase PD yang telah menyusun LKPj dan LPPD	100 %
		2.4	Persentase penataan wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %
		2.5	Jumlah kecamatan yang mengadministrasikan pembakuan nama rupa bumi Kab. Manggarai	12 Kec.
		2.6	Persentase konflik masyarakat yang difasilitasi penyelesaiannya	100 %
3.	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	3.1	Persentase Perangkat Daerah yang Kelembagaannya telah sesuai dengan Anjab, ABK dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku	100 %

4.	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan	4.1	Persentase proyek yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		4.2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan adm. pembangunan dengan baik	100 %
		4.3	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu	100 %
5	Terwujudnya organisasi Pemuda yang partisipatif	5.1.	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	11 Organ
		5.2	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	12 Organ
6.	Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat penerima manfaat Raskin;	6.1	Koordinasi pelaksanaan penyaluran Raskin bagi RTSPM di 171 Desa/Kel.	27.845 RTSPM
		6.2	Jumlah Pagu Beras	5.012.100 Kg.
7.	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflasi	7.1	Cakupan wilayah pengawasan wilayah terhadap peredaran barang dan jasa	41,67 %
		7.2	Laju Inflansi	6,32 %
8.	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	8.1	Cakupan upaya peningkatan kesehatan masyarakat	100,00 %
		8.2	Jumlah KIS yang diterbitkan	10.000 KIS
		8.3	Cakupan pelayanan bidang keagamaan	100,00 %
9.	Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan	9.1	Jumlah Dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat	132 Kali
		9.2	Jumlah aparat kehumasan dan keprotokolan yang mengikuti Diklat	5 Org.
		9.3	Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah :	110 Media
			- Media Masa	70 Media
			- Media cetak dan media luar ruangan	40 Media

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	817.448.324,00	APBD-P (Bagian Hukum)
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	200.483.000,00	APBD-P (Bagian Organisasi)
3.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	377.891.200,00	APBD-P (Bagian Pemerintahan)
4.	Program Perekonomian dan Pembangunan	555.184.824,00	APBD-P (Bagian Pembangunan & LPBJ)
5.	Program Perekonomian dan Pembangunan	65.100.000,00	APBD-P (Bagian Ekonomi)
6.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80.520.000,00	APBD-P (Bagian Kesra)
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	11.483.564.400,00	APBD-P (Bagian Kesra)
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.056.400.000,00	APBD-P (Bagian Umum)
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	243.514.590,00	APBD-P (Bagian Humas)
JUMLAH		14.880.106.338,00	APBD-P

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan suatu gambaran hasil perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran hasil perbandingan tersebut diperoleh melalui suatu metode analisis dan sistematis menurut kaidah-kaidah tertentu yang disebut pengukuran kinerja.

Bagi instansi pemerintah termasuk juga Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai pengukuran kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Skala Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1.	≥ 100	MEMUASKAN
2	≥ 85 – 99	SANGAT BAIK
3.	≥ 70 – 84	BAIK
4.	≥ 50 – 69	CUKUP
5.	< 50	KURANG

Sekretariat Daerah telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Sasaran yang diperjanjikan sebanyak 9 (sembilan) sasaran strategis. Sasaran tersebut diukur dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja. Capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja dimaksud pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	RELISASI	%
1	2	3		4	5	6
1.	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	1.1	Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	100 %	100,00	100,00
		1.2	Jumlah Desa Sadar Hukum	5 Desa	4	80,00
		1.3	Jumlah produk hukum yang ditetapkan :	340 Produk	503	147,94
			1. Peraturan Daerah	15 Perda	14	93,33

			2. Peraturan Bupati	20 Perbub	61	305,00
			3. Keputusan Bupati	300 SK	390	130,00
			4. Instruksi Bupati	5 Inst	38	760,00
		Rata-rata				109,31
		Kategori			MEMUASKAN	
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah	2.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Laporan Kinerja	100 %	100	100,00
		2.2	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP PD sampel	60 (B)	74,64 (BB)	124,40
		2.3	Persentase PD yang telah menyusun LKPj dan LPPD	100 %	100,00	100,00
		2.4	Persentase penataan wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %	100,00	100,00
		2.5	Jumlah kecamatan yang mengadminstrasikan pembakuan nama rupa bumi Kab. Manggarai	12 Kec.	12	100,00
		2.6	Persentase konflik masyarakat yang difasilitasi penyelesaiannya	100 %	100,00	100,00
		Rata-rata				104,07
		Kategori			MEMUASKAN	
3.	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	3.1	Persentase Perangkat Daerah yang Kelembagaannya telah sesuai dengan Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100 %	100,00	100,00
		Rata-rata				100,00
		Kategori			MEMUASKAN	
4.	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan	4.1	Persentase proyek yang diselesaikan tepat waktu	100 %	96,96	96,96
		4.2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan adm. Pembangunan dengan baik	100 %	95,92	95,92
		4.3	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu	100 %	98,50	98,50

		Rata-rata				97,13
		Kategori			SANGAT BAIK	
5	Terwujudnya organisasi Pemuda yang partisipatif	5.1	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	11 Organ	8	72,73
		5.2	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	12 Organ	14	116,67
		Rata-rata				94,70
		Kategori			SANGAT BAIK	
6.	Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat penerima manfaat Raskin	6.1	Koordinasi pelaksanaan penyaluran Raskin bagi RTSPM di 171 Desa/Kel.	27.845 RTSPM	26.718	95,95
		6.2	Jumlah Pagu Beras	5.012.100 Kg.	4.809.240	95,95
		Rata-rata				95,95
		Kategori			SANGAT BAIK	
7.	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflasi	7.1	Cakupan wilayah pengawasan wilayah terhadap peredaran barang dan jasa	41,67 %	41,67	100,00
		7.2	Laju Inflansi	6,32 %	0,39	193,83
		Rata-rata				146,91
		Kategori			MEMUASKAN	
8.	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	8.1	Cakupan upaya peningkatan kesehatan masyarakat	100 %	0,00	0,00
		8.2	Jumlah KIS yang diterbitkan	10.000 KIS	23.631	236,31
		8.3	Cakupan pelayanan bidang keagamaan	100 %	0	0,00
		Rata-rata				78,77
		Kategori			MEMUASKAN	
9.	Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan	9.1	Jumlah Dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat	132 Kali	132	100,00
		9.2	Jumlah aparat kehumasan dan keprotokolan yang mengikuti Diklat	17 Org.	10	58,82
		9.3	Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah :	110 Media	57	51,82
			- Media Masa	70 Media	31	44,29
			- Media cetak dan media luar ruangan	40 Media	26	65,00

		Rata-rata			66,29
		Kategori		CUKUP	
RATA-RATA SASARAN 1 S/D 9					99,24
KATEGORI				SANGAT BAIK	
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.	REALISASI	%
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	817.448.324,00	APBD-P (Bagian Hukum)	719.935.760,00	88,07
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	200.483.000,00	APBD-P (Bagian Organisasi)	200.211.559,00	99,86
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	377.891.200,00	APBD-P (Bagian Pemerintahan)	375.559.665,00	99,38
4	Program Perekonomian dan Pembangunan	555.184.824,00	APBD-P (Bagian Pembangunan & LPBJ)	554.851.340,00	99,94
5	Program Perekonomian dan Pembangunan	65.100.000,00	APBD-P (Bagian Ekonomi)	65.100.000,00	100,00
6	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80.520.000,00	APBD-P (Bagian Kesra)	43.520.000,00	54,05
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.483.564.400,00	APBD-P (Bagian Kesra)	11.343.893.400,00	98,78
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.056.400.000,00	APBD-P (Bagian Umum)	1.055.460.939,00	99,91
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.514.590,00	APBD	241.691.750,00	99,25
JUMLAH		14.880.106.338,00	APBD-P	14.600.224.453,00	98,12

Tabel 3.1. menginformasikan bahwa capaian kinerja sasaran tahun 2021 sebesar **99,24%** dengan kategori **SANGAT BAIK** dan capaian kinerja keuangan dari program-program strategis mencapai **98,12%**. Dari 9 (sembilan) sasaran, terdapat 4 (empat) sasaran atau **44,44%** berkategori **MEMUASKAN**, 3 (tiga) sasaran atau **33,33%** kategori **SANGAT BAIK**, 1 (satu) sasaran atau **11,11%** masing-masing dengan kategori **BAIK** dan **CUKUP**. Capaian kinerja tahun 2021 ini mengalami penurunan sebesar **0,04%** jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai **99,28%**.

Capaian kinerja Setda tahun 2020 dan 2021 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dimana tahun 2016 mencapai **101,47%**, tahun 2017 mencapai **108,85%**, tahun 2018 mencapai **108,02%** dan tahun 2019 mencapai **124,93%**. Penurunan dalam kurun waktu 2020-2021 tersebut

disebabkan karena adanya pandemi *covid-19*, sehingga Pemerintah mengambil beberapa kebijakan seperti:

1. Kebijakan tentang larangan menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19.
2. Melakukan *refocussing* dalam rangka realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Manggarai.
3. Beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran tidak dilaksanakan.

Dalam rangka evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja yang telah tergambar pada tabel 3.1 di atas, maka capaian kinerja dimaksud diperbandingkan dengan target dan realisasi serta capaian tahun 2020. Realisasi dan capaian tahun 2021 ini, juga merupakan realisasi dan capaian akhir periode RENSTRA 2016-2021. Evaluasi dan analisisnya secara rinci dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DAN HAM DAN PEMBENAHAN SUB SISTEM HUKUM DAERAH

Tabel 3.2

Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan Pembenaan Sub Sistem Hukum Daerah dan Perbandingannya Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		%	Tahun 2021/ Akhir Renstra 2016-2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	%	100	100	100,00	100	100	100,00
2	Jumlah Desa Sadar Hukum	Desa	1	0	0	5	4	80,00

3	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan :	Produk	340	450	132,35	340	503	147,94
	1. Perda	Perda	15	7	46,67	15	14	93,33
	2. Peraturan Bupati	Perbub	20	56	280,00	20	61	305,00
	3. Keputusan Bupati	SK	300	361	120,33	300	390	130,00
	4. Instruksi Bupati	Inst.	5	26	520,00	5	38	760,00
Rata-rata					77,45			109,31
Kategori					BAIK		MEMUASKAN	
Kode								

Sumber : Bagian Hukum Setda, 2021

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh rata-rata kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 109,31% dengan kategori **MEMUASKAN**. Capaian sasaran kinerja ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 77,45%. Adapun uraian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator **Persentase Kasus Bantuan Hukum yang Tertangani**

Capaian indikator ini adalah 100,00%, dimana pada tahun 2021 bantuan hukum diberikan terhadap 4 (empat) kasus yaitu :

- a. Perkara Perdata Nomor : 2/PDT.G/2021/PN. Rtg, tanggal 13 Januari 2021(hal : Wanprestasi-Ingkar Janji, Penggugat : Perseroan Komanditer CV. PATRADA, Tergugat I : Kristianus Domingo, SE (PPK), Tergugat II : Bupati Manggarai c.q. Camat Langke Rembong);
- b. Banding Perkara Perdata Nomor : 2/PDT.G/2021/PN. Rtg, tanggal 13 Januari jo Nomor : 153/PDT/2021/PT KPG tanggal 20 September 2021 (hal : Wanprestasi-Ingkar Janji, Terbanding : Perseroan Komanditer CV.PATRADA, Pembanding : Tergugat II : Bupati Manggarai c.q. Camat Langke Rembong, Kabupaten Manggarai);
- c. Banding Perkara Perdata Nomor: 13/PDT.G/2020/PN.jo Nomor : 33/PDT/2021/Pt KPG (hal : Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat : Rewoa Eddy FX Eduardus, dkk, Terbanding I semula Tergugat I Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur c.q. Pemerintah Kabupaten Manggarai).

- d. Perkara Perdata Nomor : 23/PDT.G/2021/PN.Rtg Tanggal 05 Oktober 2021
(hal : Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat : Fransiskus Janggut, Tergugat :
Pemerintah Kabupaten Manggarai c.q. Bupati Manggarai, Turut Tergugat :
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur c.q. Bupati Manggarai Timur.

2. Indikator **Jumlah Desa Sadar Hukum**

Dalam dokumen Renstra 2016-2021 khusus di perencanaan tahun 2021 dan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021, target yang ditetapkan merupakan target akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian maka realisasi tahun 2021 merupakan akumulasi dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 4 (empat) desa yang ditetapkan sebagai **Desa Sadar Hukum** atau 80,00% dari 5 (lima) desa yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2021.

Tabel 3.3
Desa Sadar Hukum di Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Target	Realisasi	%	Ket.
1.	2016	1 Desa	1 Desa	100	Desa Compang Dalo Kec. Ruteng ditetapkan melalui SK Nomor : HK/141/2016 tanggal 20 Maret 2016
2.	2017	1 Desa	1 Desa	100	Desa Ketang Kecamatan Lelak ditetapkan melalui SK Nomor : Hk/421/2017 tanggal 7 Agustus 2017
3.	2018	1 Desa	1 Desa	100	Desa Paka Kec. Satar Mese yang ditetapkan melalui SK Nomor : HK/227/2018 tanggal 11 April 2018
4.	2019	1 Desa	1 Desa	100	Desa Bangka Ajang Kec. Rahong Utara yang ditetapkan melalui SK Nomor : HK/475/2019 tanggal 21 Oktober 2019
5.	2020	1 Desa	-	-	Tidak Ada
6.	s/d 2021	5 Desa	4	80,00	Tidak Ada
Jumlah		5 Desa	4 Desa	80,00	S/d Tahun 2016-2021, realisasi tidak sesuai target tahunan dalam RENSTRA SETDA.

Sumber : Bagian Hukum Setda, 2021

Sesuai tabel tersebut di atas, Penetapan Desa Sadar Hukum hanya dilakukan pada tahun 2016-2019. Sedangkan pada tahun 2020-2021 tidak ada desa yang ditetapkan

sebagai desa sadar hukum. Hal ini disebabkan karena kegiatan untuk mendukung realisasi capaian indikator sasaran tidak dilaksanakan sebagai dampak dari adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai tentang larangan menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Pembatalan kegiatan dan realokasi anggaran tersebut tidak diikuti dengan perubahan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Substansi Perubahan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan hanya mengenai perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran sedangkan target kinerja tetap mengikuti target yang termuat dalam dokumen RENSTRA Setda Kabupaten Manggarai 2016-2021.

3. Indikator **Jumlah Produk Hukum Yang Ditetapkan**

Capaian kinerja indikator ini adalah **147,94%** atau bermakna **MEMUASKAN**. Capaian kinerja indikator ini melampaui terget kinerja yang ditetapkan, yakni sebanyak 501 dari 340 yang ditargetkan. Capaian kinerja sebesar **147,94%** merupakan rata-rata capaian dari 4 (empat) sub indikator yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.

Tabel 3.4
Jumlah Produk Hukum Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Produk Hukum yang ditetapkan				Jumlah
		Perda	Perbub	Keputusan	Instruksi	
1.	2016	11	49	547	14	621
2.	2017	12	53	627	17	709
3.	2018	12	61	463	7	543
4.	2019	8	55	577	17	657
5.	2020	7	56	361	26	450
6.	2021	14	59	390	38	501
Jumlah		64	333	2.965	119	3.481

Sumber : Bagian Hukum Setda, 2021

Anggaran yang terserap untuk mewujudkan capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2021 sebesar Rp.719.935.760,00 atau 88,07% dari total APBD Perubahan sebesar Rp.817.448.324,00 melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel 3.5

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perbandingannya dengan Capaian Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		%	Tahun 2021/ Akhir Renstra 2016-2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase SKPD yang telah menyusun Laporan Kinerja	%	100	100	100,00	100	100	100,00
2	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP PD Sampel	Kategori	60 (B)	73,36 (BB)	122,27	60 (B)	74,64 (BB)	124,40
3	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun LKPj dan LPPD	%	100	100	100,00	100	100	100,00
4	Persentase penataan wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	%	100	100	100,00	100	100	100,00
5	Jumlah kecamatan yang mengadminis-trasi pembakuan nama rupa bumi Kab. Manggarai	Kec.	12	12	100,00	12	12	100,00
6	Persentase konflik masyarakat yang difasilitasi penyelesaiannya	%	100	100	100,00	100	100	100,00
Rata-rata					103,71			104,07
Kategori				MEMUASKAN			MEMUASKAN	

Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 104,07% kategori **MEMUASKAN**. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun

2020 yang mencapai 103,74% dengan predikat yang sama **MEMUASKAN**. Capaian kinerja sasaran sebesar 104,07% tahun 2021 didukung dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.487.907.665,00 atau 99,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp.490.495.200,00 melalui program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda. Uraian ke-6 indikator sasaran di atas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Indikator **Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menyusun Laporan Kinerja**
Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, jumlah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai sebanyak 41 Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 1 Inspektorat Daerah, 19 Dinas Daerah, 6 (enam) Badan, 1 (satu) BLUD RSUD dan 12 Kecamatan. Dari 41 Perangkat Daerah tersebut semuanya wajib dan telah menyusun LKIP dan dokumen SAKIP lainnya tahun 2020 dengan capaian 100,00%.
2. Indikator **Rata-Rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Sampel**
Pada tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai telah melakukan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2020 kepada 20 Perangkat Daerah (secara sampling). Dari evaluasi tersebut diperoleh nilai rata-rata 74,64 dengan kategori **BB** atau SANGAT BAIK dengan persentase capaian 124,40% dari target 60 (B). Nilai rata-rata 74,64 tahun 2021 ini meningkat jika dibandingkan dengan nilai rata-rata tahun 2020 yang mencapai 73,36 ketagori **BB** atau SANGAT BAIK. Adapun Perangkat Daerah sampel dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perangkat Daerah Sampel Evaluasi SAKIP
Tahun 2016-2021

No.	Tahun Evaluasi	Nama Perangkat Daerah Sampel		Kinerja		Kategori
				%	Nilai	
1.	2016	1.	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	78,56	78,56	BB
		2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,16	79,16	BB
		3.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	73,60	73,60	BB
		4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70,26	70,26	BB
		5.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	71,23	71,23	BB
		6.	Dinas Pertambangan dan Energi	73,47	73,47	BB
		7.	Sekretariat DPRD	71,04	71,04	BB
Rata-rata Hasil Evaluasi Tahun 2016				73,90	73,90	BB
2.	2017	1.	Badan Keuangan	67,06	67,06	B
		2.	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	74,52	74,52	BB
		3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67,85	67,85	B
		4.	Dinas Kesehatan	68,78	68,78	B
		5.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	75,94	75,94	BB
		6.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	69,40	69,40	B
		7.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	67,85	67,85	B
		8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	71,04	71,04	BB
		9.	Dinas Pertanian	68,07	68,07	B
		10.	Dinas Lingkungan Hidup	67,99	67,99	B
Rata-rata Hasil Evaluasi Tahun 2017				69,85	69,85	B
3.	2018	1.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	81,20	81,20	A

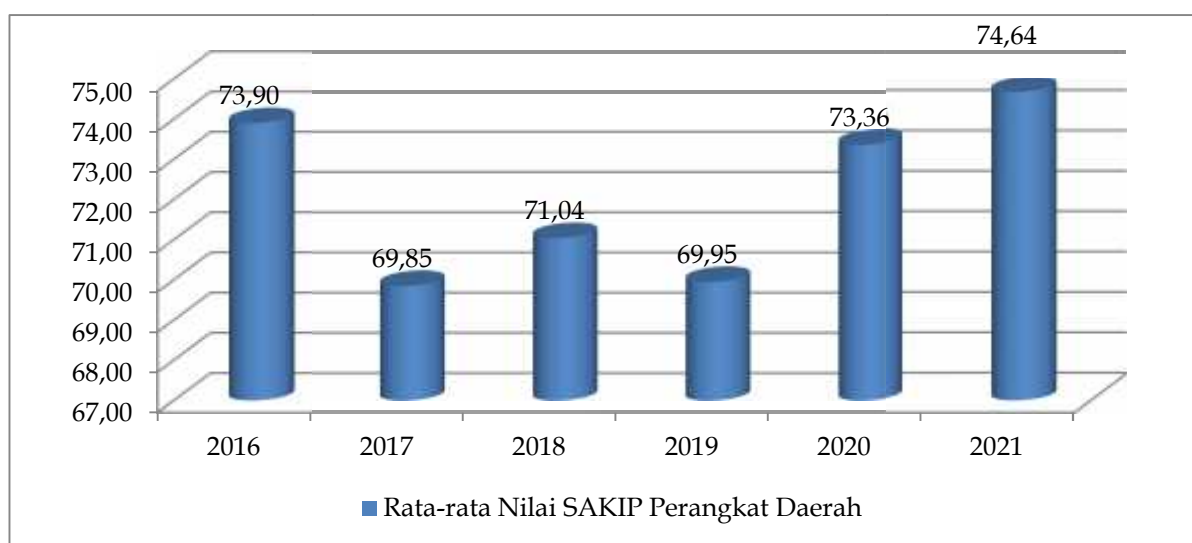
		2.	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	55,69	55,69	CC
		3.	Dinas Lingkungan Hidup	74,83	74,83	BB
		4.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70,52	70,52	BB
		5.	Dinas Peternakan	79,41	79,41	BB
		6.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	69,57	69,57	B
		7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75,96	75,96	BB
		8.	Dinas Perdagangan	66,53	66,53	B
		9.	Dinas Perhubungan	70,05	70,05	BB
		10.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	66,60	66,60	B
Rata-rata Hasil Evaluasi Tahun 2018				71,04	71,04	BB
4.	2019	1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69,30	69,30	B
		2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	59,36	59,36	CC
		3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75,04	75,04	BB
		4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	73,19	73,19	BB
		5.	Dinas Kesehatan	66,39	66,39	B
		6.	Dinas Sosial	67,75	67,75	B
		7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,26	78,26	BB
		8.	Dinas Pendidikan	69,50	69,50	B
		9.	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	73,29	73,29	BB
		10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	66,02	66,02	B
		11.	Badan Keuangan	79,73	79,73	BB
		12.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	61,62	61,62	B
Rata-rata Hasil Evaluasi Tahun 2019				69,95	69,95	B
5.	2020	1.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlind. Anak	80,75	80,75	A

		2.	Dinas Kesehatan	72,43	72,43	BB
		3.	Dinas Perhubungan	72,71	72,71	BB
		4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,22	72,22	BB
		5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74,05	74,05	BB
		6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	70,57	70,57	BB
		7.	Dinas Lingkungan Hidup	70,57	70,57	BB
		8.	Dinas Pertanian	72,26	72,26	BB
		9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	72,79	72,79	BB
		10.	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	72,08	72,08	BB
		11.	Dinas Perdagangan	75,42	75,42	BB
		12.	Dinas Peternakan	77,37	77,37	BB
		13.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	72,94	72,94	BB
		14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73,76	73,76	BB
		15.	Dinas Pendidikan	77,01	77,01	BB
		16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	66,82	66,82	B
		Rata-rata Hasil Evaluasi Tahun 2020		73,36	73,36	BB
6.	2021	1.	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	73,76	73,76	BB
		2.	Badan Kesbangpol Linmas	71,28	71,28	BB
		3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,26	72,26	BB
		4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	75,86	75,86	BB
		5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	73,56	73,56	BB
		6.	Dinas Pertanian	74,93	74,93	BB
		7.	Inspektorat	71,28	71,28	BB
		8.	Dinas PUPR	73,76	73,76	BB
		9.	Dinas Kominfo	71,28	71,28	BB
		10.	Dinas Kesehatan	79,55	79,55	BB
		11.	Sekretariat Daerah	87,93	87,93	A
		12.	Perhubungan	73,98	73,98	BB
		13.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	75,68	75,68	BB

	14.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75,90	75,90	BB
	15.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	80,96	80,96	A
	16.	Dinas Lingkungan Hidup	73,31	73,31	BB
	17.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	74,77	74,77	BB
	18.	Dinas Sosial	67,67	67,67	B
	19.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	73,31	73,31	BB
	20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	71,83	71,83	BB
Rata-rata Hasil Evaluasi Tahun 2021			74,64	74,64	BB

Sumber : Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda, 2021

Grafik 3.1
Rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Sampel
Tahun 2016-2021



Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan nilai evaluasi penerapan SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai telah dan terus melakukan pendampingan pada saat penyusunan dokumen LKIP dan dokumen terkait lainnya.



Perlu kami informasikan bahwa hasil Evaluasi dari Kementerian PANRB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai, memberikan penilain **61,60** dengan kategori **B atau BAIK** terhadap penerapan SAKIP tahun 2019.

Terhadap penerapan SAKIP tahun 2020, Kementerian PANRB belum memberikan penilaian. Adapun hasil penilaian Kementerian PANRB atas implementasi SAKIP Kabupaten Manggarai, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Nilai SAKIP Kabupaten Manggarai
Tahun 2013-2020

No.	Tahun	Nilai SAKIP	Kategori	Keterangan
1.	2013	38,51	C (Kurang)	Terhadap SAKIP Tahun 2012
2.	2014	51,98	CC (Cukup Baik)	Terhadap SAKIP Tahun 2013
3.	2015	55,39	CC (Cukup Baik)	Terhadap SAKIP Tahun 2014
4.	2016	58,59	CC (Cukup Baik)	Terhadap SAKIP Tahun 2015
5.	2017	60,57	B (Baik)	Terhadap SAKIP Tahun 2016
6.	2018	60,65	B (Baik)	Terhadap SAKIP Tahun 2017
7.	2019	61,06	B (Baik)	Terhadap SAKIP Tahun 2018
8.	2020	61,60	B (Baik)	Terhadap SAKIP Tahun 2019

3. Indikator Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menyusun LKPj Dan LPPD Sesuai Ketentuan

Capaian indikator sasaran ini adalah 100% dimana semua Perangkat Daerah/Unit Kerja telah menyusun LKPj dan LPPD.



Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Kabupaten Manggarai tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri mendapat skor 2,7951 status kinerja TINGGI. Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan nilai/status kinerja TINGGI ini, Bagian

Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai tahun 2020 telah mengikuti BIMTEK penyusunan LPPD dan melakukan pendampingan pada saat penyusunan dokumen LPPD dan LKPj Perangkat Daerah.

4. Indikator **Persentase Penataan Wilayah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Capaian dari indikator sasaran ini adalah 100%, dimana sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bagian Pemerintahan Setda telah melakukan penataan wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penataan yang dilakukan adalah terkait pemekaran dan batas wilayah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan. Penataan wilayah kabupaten, kecamatan dan kelurahan menjadi tanggungjawab Bagian Pemerintahan. Sedangkan untuk wilayah desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai. Dalam kurun waktu 2015-2021, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bagian Pemerintahan Setda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai telah melakukan penataan wilayah berupa penyelesaian tapal batas wilayah antar kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa serta pemekaran wilayah kecamatan, kelurahan dan desa. Hasil dari penataan tersebut adalah Kabupaten Manggarai merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT. Secara geografis terletak di antara 08^o.14'27,32"-08^o 54'57,17" LS dan 120^o 13'41,34"-120^o 32'47,22" BT, dan secara administratif berbatasan dengan:

- ❖ Laut Flores di bagian utara.
- ❖ Laut Sawu di bagian selatan.
- ❖ Kabupaten Manggarai Timur di bagian timur.

❖ Kabupaten Manggarai Barat di bagian barat.

Luas wilayah Kabupaten Manggarai adalah 2.096,44 Km² atau 209.644 Ha yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan Pulau Kecil yaitu Pulau Mules. Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 26 kelurahan dan 145 desa serta 52 desa persiapan.

5. Indikator **Jumlah Kecamatan yang Mengadministrasikan Pembakuan Nama Rupa Bumi Kabupaten Manggarai**

Sampai dengan tahun 2021, dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai semuanya telah mengadministrasikan pembakuan rupa bumi, dengan capaian 100%. Pembakuan nama rupabumi dimaksudkan untuk menetapkan nama rupabumi sesuai kaidah pembakuan yang dilakukan melalui proses dan persyaratan tertentu.

6. Indikator **Persentase Konflik Masyarakat Yang Difasilitasi Penyelesaiannya**

Indikator sasaran penyelesaian konflik selama 2017-2021, menghasilkan capaian kinerja 100% dengan kategori MEMUASKAN. Pada tahun 2021 tercatat ada 10 kasus yang masuk melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai. Dari 10 kasus tersebut semuanya telah difasilitasi/ditangani penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat. Kesepuluh kasus yang difasilitasi/ditangani penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai tersebut :

1. Masalah pembabatan tanaman dan pengrusakan pagar rumah di dusun Ramud, Desa Terong, Kec. Satar Mese Barat, yang dilakukan oleh Sdr. Anton Taruk;
2. Masalah tanah Lingko Mbeleng, Satar Mese Utara, antara warga Gendang Nao dengan ahli waris Paulus Ntunu;
3. Masalah tanah Lingko Tagol, Kec. Ruteng yang disengketakan antara Tua Gendang Nia Mese, Niang Golo dan Cumbi Mese dengan ahli waris Ambros Ndagu;

4. Masalah tanah antara sdr. Romaldus Wuncung dengan Sdr. Gerfinus Rana di Kec. Cibal;
5. Masalah pengaduan masyarakat dusun Namut, Desa Compang Namut, Kec. Ruteng, atas kesalahan penulisan nama desa pada sertifikat tanah;
6. Masalah tanah yang terletak di Kelurahan Wae Belang, Kec. Ruteng, antara Yohanes Mahot, dkk, warga Kelurahan Wae Belang VS Hendrikus Kebaru, Warga Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong;
7. Masalah tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai yang terletak di Nanga Banda, Kel. Baru, Kec. Reok;
8. Masalah tanah milik Pemda Kab. Manggarai yang berada di tanah Erfpach Reo yang diokupasi oleh masyarakat Gendang Mahima pada Blok 14, 15 dan 16;
9. Masalah tanah antara Gendang Nampo VS Gendang Meda, Desa Golo Woi, Kec. Cibal Barat; dan
10. Masalah tanah Nanga Lanang.

SASARAN 3 : TERWUJUDNYA PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG SESUAI ANJAB, ABK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tabel 3.10

Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Perbandingannya dengan Capaian Tahun sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		%	Tahun 2021/ Akhir Renstra 2016-2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	%	100	100	100,00	100	100	100,00
Rata-rata					100,00			100,00
Kategori			MEMUASKAN			MEMUASKAN		

Persentase capaian indikator sasaran ini adalah 100%, dimana pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bagian organisasi Setda telah melakukan Penataan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut di atas, maka Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 4 Bagian yaitu:
 1. Bagian Pemerintahan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 3. Bagian Hukum.
 4. Bagian Kerja Sama
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 Bagian yaitu:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- c. Asisten Administrasi Umum membawahi 3 Bagian yaitu:
 1. Bagian Umum.
 2. Bagian Organisasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai dengan Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD.
3. Inpesktorat Daerah tipe A
4. Dinas Daerah Kabupaten Manggarai terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 6. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
9. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
16. Dinas Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan;
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan dan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. Dinas Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan; dan

19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
4. Badan Daerah Kabupaten Manggarai terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan serta pembinaan KORPRI;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Kecamatan, yang terdiri dari 12 kecamatan dan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan, antara lain :
 - a. Kecamatan Langke Rembong tipe A;
 - b. Kecamatan Ruteng tipe A;
 - c. Kecamatan Wae Ri'i tipe A;
 - d. Kecamatan Cibal tipe A;
 - e. Kecamatan Reok tipe A;
 - f. Kecamatan Satar Mese tipe A;
 - g. Kecamatan Satar Mese Barat tipe A;
 - h. Kecamatan Lelak tipe A;
 - i. Kecamatan Rahong Utara tipe A;
 - j. Kecamatan Cibal Barat tipe A;
 - k. Kecamatan Reok Barat tipe A; dan
 - l. Kecamatan Satar Mese Utara tipe A.

6. Selain itu, terdapat 1 (satu) perangkat daerah yang tidak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13) yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai yang sebelumnya ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai, maka dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 menjadi Unit Organisasi bersifat khusus di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Ben Mboi.

Pengelompokan Perangkat Daerah dimaksud dapat dibaca pada table 3.11

Tabel 3.11
Komposisi Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai

No.	Sekretariat	Inspektorat Daerah	Dinas	Badan	Unit Organisasi Khusus RSUD	Kecamatan	Jumlah
1	2	3	3	5	6	7	8
1.	2	1	21	6	1	12	43

Selain kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah seperti yang telah



Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai bersama Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDM Aparatur KemenpanRB, saat Penandatanganan BA Hasil Validasi Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkup Pemkab Manggarai, 19 Februari 2020 di Jakarta

diuraikan tersebut di atas, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bagian Organisasi Setda juga telah melakukan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk 120 jabatan serta melakukan tindak lanjut penyetaraan jabatan sesuai Surat Rekomendasi dari Menteri

Dalam Negeri Nomor : 800/8776/OTDA Tentang Persetujuan Penyetaraan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Terdapat 282 Jabatan Eselon IV disetarakan ke Jabatan Fungsional.

Adapun yang menjadi pendorong keberhasilan dari sasaran ini pada tahun 2021 adalah adanya dukungan SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta kesediaan anggaran sebesar Rp.60.052.000,00 realisasi Rp.59.930.559,00 atau 99,80% melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

SASARAN 4 : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tabel 3.13

Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Perbandingannya dengan Capaian Tahun sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		%	Tahun 2021/ Akhir Renstra 2016-2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase jumlah proyek yang diselesaikan tetap waktu	%	100	90,96	90,96	100	96,66	96,66
2.	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Admi-	%	100	91,84	91,84	100	95,92	95,92

	nistrasi pembangunan dengan baik							
3.	Persentase jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu	%	100	97,936	97,36	100	98,50	98,50
Rata-rata					93,38			97,13
Kategori				SANGAT BAIK			SANGAT BAIK	

Pada tahun 2021, rata-rata capaian kinerja sasaran ini adalah 97,13%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 93,38% dengan kategori yang sama yaitu **SANGAT BAIK**. Kinerja sasaran ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

1. Indikator **Persentase Jumlah Proyek yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Realisasi indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2021 adalah 96,96% dari target 100% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Realisasi 96,96% ini didapat dari jumlah paket proyek (konstruksi) yang selesai tepat waktu sebanyak 319 paket dari total paket proyek tahun 2021 sebanyak 329 paket. Artinya terdapat 10 paket proyek yang pekerjaannya tidak selesai pada tahun 2021 (KDP). Ke-10 paket proyek tersebut terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 9 (sembilan) paket dan Dinas Pendidikan sebanyak 1 (satu) paket.

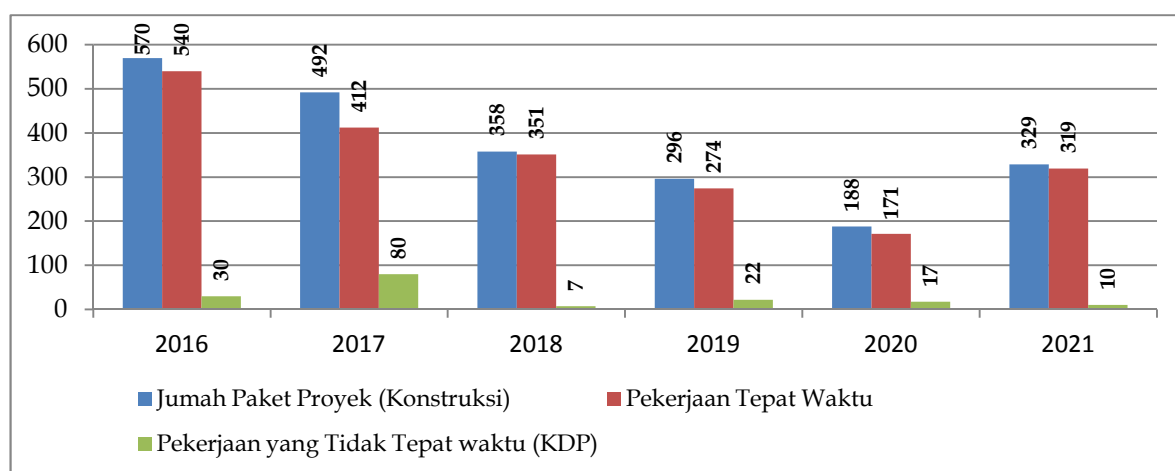
Capaian tahun 2021 ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 90,96%. Pada tahun 2020 terdapat 188 paket pekerjaan fisik (konstruksi) dengan rincian sebanyak 171 paket yang tepat waktu dan 17 (tujuh belas) paket proyek dinyatakan tidak tepat waktu atau tidak mencapai 100%. Ke- 17 paket proyek tersebut tersebar pada 4 (empat) Perangkat Daerah yaitu 14 (empat belas) paket di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (13 KDP dan 1 PHK), 1 (satu) paket di Dinas Kesehatan, 1 (satu) paket di Badan Keuangan dan Aset Daerah dan 1 (satu) paket di BLUD RSUD dr. Ben Mboi 1 Kabupaten Manggarai.

Tabel 3.14
Penyelesaian Proyek Tepat Waktu
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jlh. Proyek	Tepat waktu	%	Tidak tepat waktu	%
1.	2016	570	540	94,74	30	5,26
2.	2017	492	412	83,74	80	16,26
3.	2018	358	351	98,04	7	1,96
4.	2019	296	274	92,57	22	7,43
5.	2020	188	171	90,96	17	9,04
6.	2021	329	319	96,66	10	3,04
Jumlah		2.233	2.067	92,57	166	7,43

Sumber: Bagian Adm. Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda, 2021

Grafik 3.2
Paket Proyek (Konstruksi) Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2021



Sumber: Bagian Adm. Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda, 2021

2. Indikator Persentase Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Administrasi Pembangunan Dengan Baik

Indikator ini dimaksudkan untuk melihat Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai *time schedule* dan sekuensi yang ditetapkan oleh Bupati Manggarai antara lain daya serap anggaran, penyampaian laporan penggunaan dana, baik yang dibiayai APBN, DAK, TEPPA, Dana Tugas Pembantuan (TP), APBD I maupun APBD II. Realisasi indikator sasaran ini pada

tahun 2021 adalah 95,92% atau terdapat 47 Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan administrasi dengan baik dari 49 Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ada di Kabupaten Manggarai. Sedangkan 2 (dua) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan administrasi dengan baik adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan. Realisasi 95,92% dari target 100% menghasilkan capaian kinerja 95,92% kategori SANGAT BAIK. Capaian indikator ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai 91,88%.

Kriteria Perangkat Daerah/Unit kerja yang tidak melaksanakan administrasi pembangunan dengan baik dilihat dari penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan *time schedule* serta pelaksanaan penataan administrasi yang tidak sesuai dengan sekuensi yang ditetapkan oleh Bupati Manggarai.

3. Persentase **Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Tepat Waktu**

Pada tahun 2021, terdapat 665 paket pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Manggarai termasuk 329 paket konstruksi yang terdiri dari 190 paket yang dilakukan dengan Metode Tender/Seleksi dan E-Purchasing sedangkan 475 paket yang dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung dan Swakelola. Dari seluruh jumlah paket Pengadaan Barang/Jasa terdapat 10 paket pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu atau Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Dari 666 paket pengadaan tersebut, yang tepat waktu sebanyak 655 atau 98,35% dan terdapat 11 paket pengadaan atau 1,65% dinyatakan tidak tepat waktu. Realisasi 98,35 dari target 100% menghasilkan capaian kinerja sebesar 98,35% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Capaian ini meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 97,36%. Pada tahun 2020, terdapat 643 paket pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Manggarai termasuk di dalamnya 188 paket pekerjaan fisik konstruksi. Dari 643 paket penggandaan barang dan jasa yang tepat waktu 626 paket atau 97,36% dan terdapat 17 paket atau 2,64% dinyatakan tidak tepat waktu.

Realisasi penyerapan anggaran sasaran ini pada tahun 2021 sebesar Rp.554.851.340,00 atau 99,94% dari total anggaran perubahan sebesar Rp.555.184.824,00 melalui program Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi

Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Manggarai. Capaian kinerja sasaran ini belum sesuai yang diharapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2021, disebabkan oleh:

1. Belum semua Pengguna Anggaran memperhatikan pentingnya *time schedule* dan langkah-langkah pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran oleh Bupati Manggarai sebagai alat kendali pelaksanaannya.
2. Keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dan penyebarannya tidak merata pada PD/unit kerja, yang menyebabkan persiapan proses pelelangan dan pembentukan panitia lelang mengalami keterlambatan.
3. Koordinasi intern dan antar PD/unit kerja masih lemah sehingga proses penyediaan barang dan jasa terlambat.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam rangka mengatasi ketidakcapaian sasaran ini adalah:

- a. Menginstruksikan kepada Pimpinan PD/unit kerja untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun yang akan datang.
- b. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah agar dilakukan sesuai dengan Keputusan Bupati Manggarai yang dikeluarkan setiap tahun anggaran.
- c. Menambah jumlah aparatur yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tabel 3.15
Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah									Keterangan
		Paket Konstruksi / Fisik			Paket Konsultasi / Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya			Jumlah			
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Jlh	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Jlh	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Jlh	
1	2016	540	30	570	479	-	479	1.019	30	1.049	30 paket konstruksi / fisik yang tidak tepat waktu atau tidak mencapai 100% terdiri dari 11 paket masing-masing di Dinas PU dan Dinkes, 2 paket di Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan masing-masing 1 paket di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BPBD, BLHD dan RSUD Dr.Ben Mboi
2	2017	412	80	492	437	-	437	849	80	929	80 paket konstruksi / fisik yang tidak tepat waktu atau tidak mencapai 100% tersebut terdiri dari 27 paket di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 37 paket di Dinas Kesehatan, 12 paket di Dinas Pertanian, 2 (dua) paket di Dinas Pertenakan dan masing-masing 1 (satu) paket di Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
3	2018	351	7	358	402	-	402	753	7	760	7 paket konstruksi / fisik yang tidak tepat waktu atau tidak mencapai 100% tersebut terdiri dari 3 paket di Dinas PUPR, 2 paket di Dinas Kesehatan dan 1 paket masing-masing di Dinas Perdagangan dan BPBD

4	2019	274	22	296	428	-	428	702	22	724	22 paket konstruksi / fisik yang tidak tepat waktu atau tidak mencapai 100% tersebut terdiri dari 18 paket di Dinas PUPR, 3 paket di BLUD RSUD dr. Ben Mboi dan 1 paket di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	2020	171	17	188	455	-	455	626	17	643	17 paket konstruksi / fisik yang tidak tepat waktu atau tidak mencapai 100% tersebut terdiri dari 14 paket di Dinas PUPR, 1 paket di Dinas kesehatan, 1 paket di Badan Keuangan dan Aset Daerah dan 1 paket di BLUD RSUD dr. Ben Mboi
6	2021	319	10	329	336	-	336	655	10	665	10 paket konstruksi/fisik yang tidak tepat waktu atau tidak mencapai 100% tersebut terdiri dari 9 paket di Dinas PUPR dan 1 paket di Dinas Pendidikan.
Jumlah		2.067	166	2.233	2.537	0	2.537	4.604	167	4.770	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah paket pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2016-2021 sebanyak **4.770** paket. Dari jumlah 4.770 paket tersebut yang merupakan paket pekerjaan fisik atau konstruksi sebanyak **2.233** paket dan **2.537** merupakan paket pekerjaan jasa konsultansi, pengadaan barang dan jasa lainnya.

SASARAN 5 : TERWUJUDNYA ORGANISASI PEMUDA YANG PARSTISIPATIF

Tabel 3.17

Terwujudnya Organisasi Pemuda Yang Parstisipatif
dan Perbandingannya Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		%	Tahun 2021 / Akhir Renstra 2016-2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	Organ	11	8	72,73	11	8	72,73
2.	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	Organ	12	14	116,67	12	14	116,67
Rata-rata					94,70			94,70
Kategori					Sangat Baik			Sangat Baik

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, 2021

Pada tahun 2021 rata-rata capaian indikator sasaran tersebut di atas adalah 94,70% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Realisasi dan capaian indikator jumlah organisasi pemuda yang dibina dan jumlah olahraga yang dibina tahun 2021 sama dengan realisasi dan capaian tahun 2020.

Pada tahun 2016 s.d 2021, jumlah organisasi pemuda dan olahraga yang dibina sesuai data dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai yang telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan KONI Kabupaten Manggarai adalah :

1. Organisasi Pemuda sebanyak 8 (delapan) organisasi yaitu PMKRI, GMNI, Karang Taruna, Pramuka, Palang Merah Remaja, OMK, REMAS dan Pemuda GMT.
2. Organisasi Olahraga yang dibina sesuai Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/91/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Susunan Ketua-Ketua Cabang Olahraga Kabupaten Manggarai Periode 2009-2013 sebanyak 14 organisasi yakni Perkemi, PASI, Taekwondo, PSSI, PSTI, IPSI, PBVSI, Karate, PBSI, PTMSI,

PELTI, PORDASI, IMI dan PERTINA. Keputusan Bupati tentang susunan kepengurusan cabang olahraga ini masih berlaku sampai sekarang.

SASARAN 6 : TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG MAKSIMAL KEPADA MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT RASKIN

Tabel 3.19

Terwujudnya Pelayanan yang Maksimal kepada Masyarakat Penerima Manfaat Raskin dan Perbandingannya Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		%	Tahun 2021 / akhir Renstra 2016-2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Koordinasi pelaksanaan penyaluran Raskin bagi RTSPM di 171 Desa/Kel.	KK	27.845	29.777	106,94	27.845	26.718	95,95
2.	Jumlah Pagu Beras	Kg.	5.012.100	7.146. 480	142,58	5.012.100	4. 809.240	95,95
Rata-rata					124,76			95,95
Kategori				MEMUASKAN			SANGAT BAIK	

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Setda, 2021

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan yang Maksimal kepada Masyarakat Penerima Manfaat Raskin dengan 2 (dua) indikator kinerja, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 95,95% dengan kategori **SANGAT BAIK**, menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 124,76%.

Sesuai RENSTRA Setda Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021, target kinerja untuk kedua indikator sasaran ini setiap tahun sama yaitu 27.845 KK untuk indikator koordinasi pelaksanaan Raskin bagi RTSPM di 171 Desa/Keluaran dan 5.012.100 Kg untuk indikator jumlah pagu beras (15 Kg per KK per Bulan).

Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di 171 Desa/Kel adalah sebagai berikut:

Penyaluran Beras Miskin (Raskin) berubah nama saat ini menjadi Bantuan Sembako kepada masyarakat di 171 Desa/Kelurahan di Kabupaten Manggarai. Untuk tahun 2021 jumlah penerima bantuan sembako berkurang dari 27.845 RTSPM menjadi 26.718 RTSPM berkurangnya sebesar 1.127 RTSPM sehingga jumlah pagu beras juga berkurang dari 5.012.100 kg menjadi 4.809.240 Kg berkurangnya sebesar 202.860 Kg. Program sembako di mulai tahun 2020, masyarakat menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai uang elektronik dengan cara membawa kartu sembako ke warung elektronik untuk dicek saldo bantuan dan dicairkan dalam bentuk sembako berupa beras, telur dan kacang hijau, bila dikonversi ke dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.200.000,00/RTSPM/bulan.

Tabel 3.20
Realisasi Penyaluran Raskin dan Beras Tambahan
Kabupaten Manggarai
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah RTS-PM	Alokasi Raskin Reguler dan Beras Tambahan (Kg)	Keterangan
1	2016	27.845	5.012.100	Jatah 15 Kg/KK/Bln
2	2017	30.237	3.628.440	Jatah 10 Kg/KK/Bln
3	2018	30.237	3.628.440	Jatah 10 Kg/KK/Bln
4	2019	30.237	3.628.440	Jatah 10 Kg/KK/Bln
5	2020	29.777	7.146.480	Jatah 20 Kg/KK/Bln
6	2021	26.718	4.809.240	Jatah 20 Kg/KK/Bln

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Setda, 2021

Ket. Tahun 2021, Rp.200.000/KK/Bln di konversi ke Beras dengan harga Rp.10.000/Kg = 20 Kg/KK/Bln



Bupati Manggarai serahkan Bantuan Beras PPKM

Pada tahun 2019, program penyaluran bantuan sosial Raskin diubah menjadi program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan pada tahun 2020 BPNT ini ditransformasikan menjadi program Sembako. Transformasi program BPNT menjadi program Sembako dilakukan dalam

rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas

program bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan transformasi tersebut diharapkan lebih tercapai yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tetap administrasi.

SASARAN 7 : MENINGKATNYA PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA MENEKAN LAJU INFLASI

Tabel 3.22
Meningkatnya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
dalam rangka Menekan Laju Inflasi
dan Perbandingannya dengan Capaian Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		%	Tahun 2021/ Akhir Renstra 2016-2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan wilayah pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa	%	41,67	50,00	119,99	41,67	41,67	100,00
2.	Laju Inflasi	%	6,32	2,24	164,55 7	6,32	0,39	193,83
Rata-rata					164,27			146,91
Kategori				MEMUASKAN			MEMUASKAN	

Persentase capaian dari sasaran ini tahun 2021 adalah 146,91%, menurun jika dibandingkan dari tahun 2020 yang mencapai 164,27% dengan predikat yang sama yaitu **MEMUASKAN** yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Indikator Cakupan Wilayah Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Realisasi dari indikator sasaran ini pada tahun 2021 adalah 41,67 atau sesuai yang ditargetkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2021 kategori MEMUASKAN. Wilayah pengawasan peredaran barang dan jasa di Kabupaten Manggarai dibagi menjadi 12 (dua belas) wilayah sesuai jumlah kecamatan. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bagian Perekonomian dan SDA berkerjasama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di 5 (lima) kecamatan yakni Kecamatan Langke

Rembong, Kecamatan Cibai, Kecamatan Reok, Kecamatan Ruteng dan Kecamatan Satar Mese. Tujuan kegiatan pengawasan ini adalah melindungi konsumen dari peredaran barang-barang dan jasa yang dapat merugikan masyarakat. Misalnya barang-barang yang telah kadaluarsa, barang-barang yang mengandung bahan berbahaya, maupun barang-barang yang kandungan isinya tidak sesuai dengan labelnya.

2. Indikator **Laju Inflasi**

Inflasi Provinsi NTT dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari 2 (dua) kota inflasi yaitu Kota Kupang dan Kota Maumere. Untuk Kabupaten Manggarai atau Kota Ruteng, Inflasi diperoleh berdasarkan data inflasi kota Maumere Provinsi NTT yaitu 0,39% dari target 6,32% dengan capaian 193,83% kategori **MEMUASKAN**.

Kedua Sasaran yaitu sasaran *Terwujudnya Pelayanan yang Maksimal kepada Masyarakat Penerima Manfaat Raskin* dan sasaran *Meningkatnya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dalam Rangka Menekan Laju Inflasi* dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.65.100.000,00 atau 100,00% melalui Program Perekonomian dan Pembangunan.

SASARAN 8 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tabel 3.24

Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Perbandingannya Dengan Pencapaian Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		%	Tahun 2021/ Akhir Renstra 2016-2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan upaya peningkatan kesehatan masyarakat	%	100	100,00	100,00	100,00	0	0,00
2	Jumlah KIS yang diterbitkan	KIS	10.000	236.631	330,80	10.000	23.631	23,631

3	Cakupan pelayanan bidang keagamaan	%	100	0	0,00	100	0	0,00
Rata-rata					112,10			78,77
Kategori					MEMUASKAN			BAIK

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, 2021

Sasaran *Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat* diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan rata-rata capaian dari ketiga indikator tersebut 78,77%, kategori BAIK. Capaian tahun 2021 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 112,10%. Penurunan Capaian Kinerja ini disebabkan karena dua indikator yaitu cakupan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan cakupan pelayanan bidang keagamaan tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan tentang larangan menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, sehingga kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator sasaran tersebut *direfocussing* dalam rangka *realokasi* anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Manggarai. Uraian dari masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Indikator **Cakupan Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat**

Target indikator sasaran ini adalah 100,00%, realisasi 0,00% dimana pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini tidak dilaksanakan karena berbagai pertimbangan terkait penyebaran covid-19 sehingga anggarannya direalokasi untuk kepentingan penanganan covid-19 di Kabupaten Manggarai.

2. Indikator **Jumlah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Diterbitkan**

KIS merupakan Program Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Tahun 2016-2019, indikator jumlah KIS yang diterbitkan berdasarkan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mendapatkan **JAMKESDA** atau KIS. Pada tahun 2016, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai bertujuan untuk mendapatkan **JAMKESDA**, sedangkan tahun 2017-2018, rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kurang Mampu melalui Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/354/2020 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021. Dalam keputusan tersebut terdapat 23.631 orang peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional. Realisasi 23.631 dari target 10.000, maka capaiannya 236,31% kategori MEMUASKAN.

Sasaran ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.11.343.893.440,00 atau 98,78% dari total pagu Rp.11.483.564.400,00.

Tabel 3.38
Data Peserta Program Jamkesnas Kabupaten Manggarai
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Peserta Tambahan Jamkesnas Thn Ybs	Total Peserta Jamkesnas	Penyerapan Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1.	S/d 2017	-	3.623	999.948.000	APBD II
2.	S/d 2018	3.002	6.625	1.828.500.000	APBD II
3.	S/d 2019	-	6.625	2.252.300.672	APBD II
		17.015	23.640	4.696.140.000	APBN
4.	S/d 2020	(9)	23.631	9.268.174.500	APBD II
5.	s/d 2021	-	23.631	11.343.893.440	APBD II
Total			23.631	30.388.956.612	

Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Manggarai, 2021

3. Indikator Cakupan Pelayanan Bidang Keagamaan

Realisasi indikator sasaran ini adalah 0,00%. Pada tahun 2021, kegiatan dalam rangka pencapaian indikator sasaran ini *tidak ada*.

SASARAN 9 : TERWUJUDNYA PELAYANAN BIDANG KEMASYARAKATAN

Tabel 3.27
Terwujudnya Pelayanan Bidang Kemasyarakatan
Dan Perbandingannya Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		%	Tahun 2021/ Akhir Renstra 2016-2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat	Kali	132	132	100,00	132	132	100,00
2	Jumlah aparat kehumasan dan Keprotokolan yang mengikuti Diklat	Org.	5	0	0,00	17	8	47,06
3	Jumlah media penyampaian informasi pemb. daerah	Media	110	39	35,45	110	57	51,82
	- Media Massa	Media	70	24	34,29	70	31	44,29
	- Media luar ruangan	Media	40	15	37,50	40	26	65,00
Rata-rata					45,15			66,29
Kategori					KURANG		CUKUP	

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Umum Setda, 2021

Tabel di atas menginformasikan bahwa rata-rata capaian ke-3 indikator sasaran pada tahun 2021 adalah 66,29% kategori **CUKUP**. Rata-rata capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 45,15% dengan kategori **KURANG**. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran ini, salah satunya adalah meminimalisir pemotongan/rasionalisasi anggaran yang berkaitan dengan pencapaian kinerja organisasi.

Adapun pencapaian indikator sasarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator **Jumlah Dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat.**

Pada tahun 2021, realisasi indikator sasaran ini masih sama dengan tahun 2020 yaitu dilakukan sebanyak 132 kali atau 100,00% dari 132 kali dialog yang ditargetkan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan kategori **MEMUASKAN**. Dialog ini dilakukan baik pada saat kunjungan kerja Bupati, Wakil Bupati ataupun pejabat lain yang mewakili (Sekda atau pejabat satu tingkat di bawahnya) yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan atau Desa maupun pada saat rapat dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat yang dilakukan di Aula Kantor Bupati Manggarai. Kegiatan ini merupakan sarana untuk mengetahui permasalahan/isu-isu strategis yang ada di masyarakat dan tentunya sangat penting sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Manggarai.

2. Indikator **Jumlah Aparat Kehumasan dan Keprotokolan Yang Mengikuti Diklat**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Manggarai memiliki peran yang penting dan strategis dalam upaya mewujudkan pelayanan bidang kemasyarakatan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan tersebut, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membutuhkan aparatur profesional yang mampu menampilkan citra yang baik, memiliki wawasan yang luas, terampil melakukan komunikasi yang efektif dan mampu membina hubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat. Sehubungan dengan itu, diperlukan Diklat ataupun BIMTEK. Sampai dengan tahun 2021, terdapat 8 (delapan) orang ASN yang telah mengikuti Diklat Kehumasan dan Keprotokolan. Realisasi 8 (delapan) ASN ini merupakan akumulasi dari realisasi tahun-tahun sebelumnya sesuai target (akumulasi) tahun 2021 atau akhir Renstra Setda 2016-2021 sebanyak 17 orang. Realisasi 9 orang dari target 17 orang maka capaian tahun 2021 atau akhir Renstra adalah 47,06% kategori **KURANG**.

Tabel 3.28
Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Yang Mengikuti Diklat
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Realisasi Penyerapan Anggaran (Rp.)	Ket.
1	2016	5 Orang	43.176.100,00	
2	2017	1 Orang	15.254.000,00	
3	2018	1 Orang	13.752.500,00	
4	2019	1 Orang	16.066.850,00	
5	2020	-	0,00	
6	2021	-	0,00	
Jumlah		8 Orang	88.249.450,00	

3. Indikator **Jumlah Media Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah**

Media yang dimaksud adalah media massa dan media luar ruangan. Media mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian informasi pembangunan daerah Kabupaten Manggarai. Media penyampaian informasi tersebut berjumlah 57 dari target 110 media atau 51,82% kategori **CUKUP**. Media-media tersebut berupa media massa, media cetak dan media luar ruangan seperti Flores Pos, Pos Kupang, Timex Kupang, media luar ruangan berupa Baliho, papan informasi, www.manggarai.kab.go.id, floresmart.com, floresa.co, zonalinenews.com, florespost.co, ranakanews, padarnews.com, realita.co, floreseditorial.com, TVRI, NTT onlinenew.com, inews NTT, radar-NTT, Ekora-NTT, kabarnusantaranews.com, foxntt.com, kupang.tribunnews.com, www.beritaflores.com, ekorantt.com, www.swarantt.net, Radio Manggarai, sepangindonesia.co.id dan Swara-NTT.

Capaian kinerja sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar Rp.243.514.590,00 realisasi sebesar Rp.241.691.750,00 atau 99,25% melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Manggarai.

3.2 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

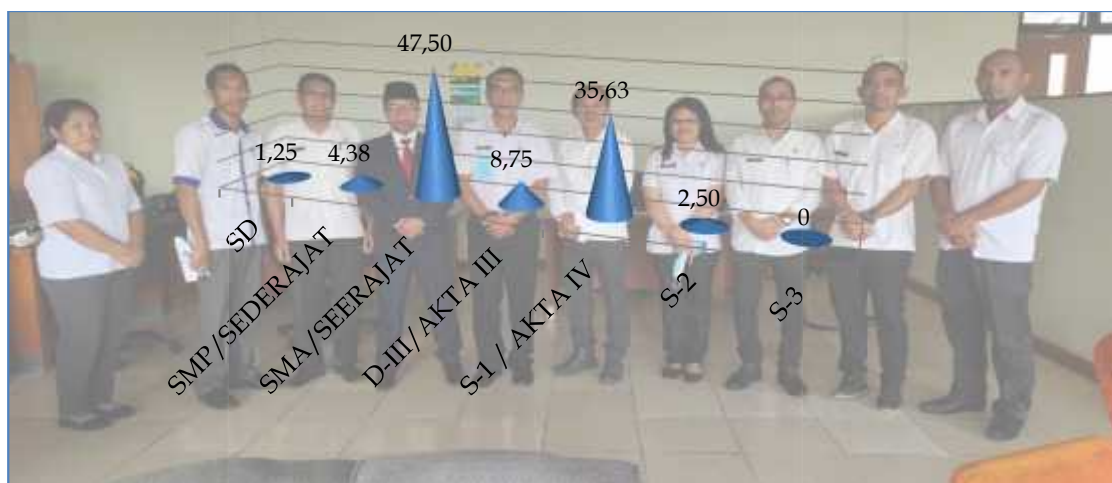
Pencapaian kinerja seperti yang telah diuraikan di atas, disamping karena didukung berbagai program strategis juga didukung dengan sumber daya lainnya. Salah satu sumber daya yang sangat besar perannya dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah Sumber Daya Manusia Aparatur. SDM Aparatur ASN Lingkup Setda Kabupaten Manggarai sampai 31 Desember 2021 berjumlah 160 orang, yang terdiri dari PNS berjumlah 107 orang (66,88%) dan Honorer 53 orang (33,13%). Adapun komposisi ASN Lingkup Setda Kabupaten Manggarai menurut tingkat pendidikan dan golongan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai ASN menurut Pendidikan sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah	%
1.	SD	0	2	2	1,25
2.	SMP /Sederajat	5	2	7	4,38
3.	SMA/Sederajat	43	33	76	47,50
4.	Diploma III/ Akta III	9	5	14	8,75
5.	S-1/ Akta IV	46	11	57	35,63
6.	S-2	4	0	4	2,50
7.	S-3	0	0	0	0
JUMLAH		107	53	160	100,00

Grafik 3.35

Kondisi Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2021



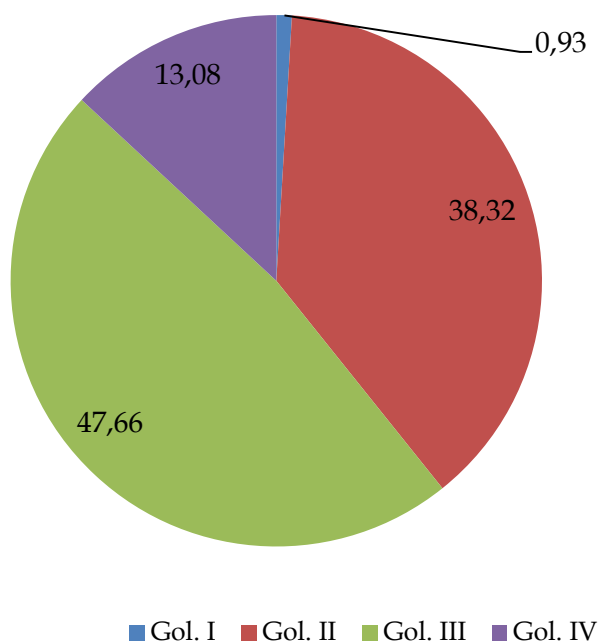
Latar foto, ASN Bagian Organisasi Setda

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas, komposisi Pegawai ASN Lingkup Setda Kabupaten Manggarai tahun 2021, didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/Sederajat yang mencapai 47,50% disusun tingkat pendidikan S-1/ Akta IV yang mencapai 35,63%.

- b. Jumlah PNS menurut Golongan sebagai berikut:

GOLONGAN		RUANG					
		A	B	C	D	JUMLAH	%
1	I	-	-	-	1	1	0,93
2	II	4	11	11	15	41	38,32
3	III	16	9	16	10	51	47,66
4	IV	2	6	5	1	14	13,08
JUMLAH						107	100,00

Diagram 3.36
Komposisi Pegawai (PNS) menurut Golongan
Tahun 2021



Komposisi Pegawai (PNS) Lingkup Setda Kabupaten Manggarai tahun 2021 menurut golongan, didominasi oleh PNS Golongan III sebesar 45,66%, disusun golongan II sebesar 38,31%.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.35.243.961.056,00, realisasi Rp.33.920.324.975,92 atau 96,24% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.30
Realisasi APBD
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2021

NO	BAGIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Bagian Adm. Pemerintahan	588.019.104,00	581.562.399,00	98,90
2.	Bagian Hukum	1.183.421.704,00	1.077.828.490	91,08
3.	Bagian Kesra	12.490.926.559,00	12.161.042.096,00	97,36
4.	Bagian Adm. Pembangunan	407.278.214,00	406.185.795,00	99,73
5.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1.486.510.167,00	1.409.876.000,00	94,84
6.	Bagian Perekonomian dan SDA	217.318.824,00	213.240.882,00	98,12
7.	Bagian Organisasi	373.752.968,00	371.110.144	99,29
8.	Bagian Umum	18.042.305.606,00	17.258.616.292,92	95,66
9.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	454.427.910,00	440.862.877,00	97,01
Jumlah		35.243.961.056,00	33.920.324.975,92	96,24

3.3.1 Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.31
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	817.448.324,00	719.935.760,00	88,07
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah	518.312.200,00	515.840.665,00	99,52
Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	60.052.000,00	59.930.559,00	99,80
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan	555.184.824,00	554.851.340,00	99,94
Terwujudnya organisasi Pemuda yang partisipatif	Hanya melalui Koordinasi dengan Perangkat Daerah yaitu Dinas pendidikan dan KONI		
Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat penerima manfaat Raskin	65.100.000,00	65.100.000,00	100,00
Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflasi			
Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	11.564.084.400,00	11.387.413.440,00	98,47
Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan	1.299.914.590,00	1.297.152.689,00	99,79
Jumlah	14.880.096.338,00	14.600.224.453,00	98,12

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,24% maka realisasi keuangan sebesar 98,12% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja.

Tabel 3.32
Tingkat Efektivitas Anggaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	Ket.
1	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	109,31	88,07	Efisien
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah	104,07	99,52	Efisien
3	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100,00	99,80	Efisien
4	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan	97,13	99,94	Tidak Efisien
5	Terwujudnya organisasi Pemuda yang partisipatif	94,70	0,00	Efisien
6	Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat penerima manfaat Raskin	121,43	100,00	Efisien
7	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflasi			
8	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	78,11	98,47	Tidak Efisien
9	Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan	66,26	99,79	Tidak Efisien
Rata-rata		99,24	98,12	Efisien

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel 3.32 tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada program-program/kegiatan/sub kegiatan strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata-rata pencapaian sasaran **99,24%** ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program-program strategis dalam rangka pencapaian sasaran sebesar **98,12%**, menunjukkan penggunaan anggaran di lingkungan Setda Kabupaten Manggarai yang efektif dan efisien.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan sebuah pertanggungjawaban atas capaian kinerja tujuan dan sasaran selama tahun 2021. Capaian kinerja tersebut dikelompokkan ke beberapa kategori tertentu. Kategori capaian menunjukkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mempunyai beberapa prinsip dan salah satunya adalah *akuntabilitas*. Prinsip ini membuka ruang adanya kontrol masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Kontrol tersebut harus direspons dengan baik oleh pemerintah. LKIP ini dibuat untuk merespons kontrol masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah telah memperlihatkan capaian kinerja yang **SANGAT BAIK** walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,28% atas sasaran-sasaran strategisnya. Uraian terinci atas kesembilan sasaran dimaksud dapat dilihat pada table 4.1. berikut:

Tabel 4.1
Tingkat Capaian Sasaran
Tahun 2020 dan 2021

No.	Sasaran	Tahun 2020		Tahun 2021 / Akhir Renstra 2016-2021	
		Nilai Capaian Kinerja (%)	Kategori / Interpretasi	Nilai Capaian Kinerja (%)	Kategori / Interpretasi
1.	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan Pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	77,45	BAIK	109,31	MEMUASKAN

2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja pemerintah daerah	103,71	MEMUASKAN	104,07	MEMUASKAN
3.	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100,00	MEMUASKAN	100,00	MEMUASKAN
4.	Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	93,38	SANGAT BAIK	97,13	SANGAT BAIK
5.	Terwujudnya organisasi pemuda yang partisipatif	94,70	SANGAT BAIK	94,70	SANGAT BAIK
6.	Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat penerima manfaat raskin	124,27	MEMUASKAN	95,95	SANGAT BAIK
7.	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflasi	142,27	MEMUASKAN	146,91	MEMUASKAN
8.	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	112,10	MEMUASKAN	78,77	BAIK
9.	Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan	45,15	KURANG	66,29	CUKUP
RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN 9 SASARAN		99,28		99,24	
PREDIKAT		SANGAT BAIK		SANGAT BAIK	

Tabel 4.1 di atas menegaskan bahwa pada tahun 2021 :

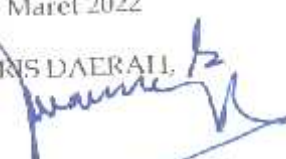
1. Kinerja **MEMUASKAN** mencakup 4 (Empat) sasaran atau 44,44% yaitu:
 - a. Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan Pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja pemerintah daerah;

- c. Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflasi; dan
2. Kinerja **SANGAT BAIK** mencakup 3 (Tiga) sasaran atau 33,33% yaitu :
 - a. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan;
 - b. Terwujudnya organisasi pemuda yang partisipatif; dan
 - c. Terwujudnya Pelayanan yang Maksimal kepada Masyarakat Penerima Manfaat Raskin
 3. Kinerja **BAIK** mencakup 1 (satu) sasaran atau 11,11% yaitu Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 4. Kinerja **CUKUP** mencakup 1 (satu) sasaran atau 11,11% yaitu Pelayanan Bidang Kemasyarakatan.

Jika laporan ini belum bisa memenuhi harapan, dengan rendah hati disampaikan permohonan maaf. Kritikan yang berbobot dan konstruktif untuk bekerja LEBIH BAIK di hari esok sangat diharapkan. Bekerja lebih baik tidak sekedar untuk mendapatkan sebuah LKIP dengan predikat Memuaskan, Sangat Baik, Baik, Cukup ataupun Kurang, tetapi terutama untuk mewujudkan **MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING.**

Ruteng, 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH



DRS. AHANG FANSI ALDUS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650726 199011 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Motang Rua No. 1 Ruteng

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DRS. JAHANG FANSI ALDUS**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERYBERTUS G.L. NABIT, SE, MA**

Jabatan : **BUPATI MANGGARAI**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS G.L. NABIT, SE, MA

Ruteng, 23 November 2021
Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH,

DRS. JAHANG FANSI ALDUS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650726 199011 1 001

FORMULIR RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	1.1	Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	100 %
		1.2	Jumlah Desa Sadar Hukum	5 Desa
		1.3	Jumlah produk hukum yang ditetapkan :	340 Produk
			1. Peraturan Daerah	15 Perda
			2. Peraturan Bupati	20 Perbub
			3. Keputusan Bupati	300 SK
			4. Instruksi Bupati	5 Inst
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah	2.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Laporan Kinerja	100 %
		2.2	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP PD sampel	60 (B)
		2.3	Persentase PD yang telah menyusun LKPj dan LPPD	100 %
		2.4	Persentase penataan wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %
		2.5	Jumlah kecamatan yang mengadminis-trasikan pembakuan nama rupa bumi Kab. Manggarai	12 Kec.
		2.6	Persentase konflik masyarakat yang difasilitasi penyelesaiannya	100 %
3.	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	3.1	Persentase Perangkat Daerah yang Kelembagaannya telah sesuai dengan Anjab, ABK dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku	100 %
4.	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan	4.1	Persentase proyek yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		4.2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan adm. pembangunan dengan baik	100 %
		4.3	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu	100 %
5	Terwujudnya organisasi Pemuda yang partisipatif	5.1.	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	11 Organ
		5.2	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	12 Organ
6.	Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat penerima manfaat Raskin	6.1	Koordinasi pelaksanaan penyaluran Raskin bagi RTSPM di 171 Desa/Kel.	27.845 RTSPM
		6.2	Jumlah Pagu Beras	5.012.100 Kg.
7.	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflasi	7.1	Cakupan wilayah pengawasan wilayah terhadap peredaran barang dan jasa	41,67 %
		7.2	Laju Inflansi	6,32 %
8.	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	8.1	Cakupan upaya peningkatan kesehatan masyarakat	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
		8.2	Jumlah KIS yang diterbitkan	10.000 KIS
		8.3	Cakupan pelayanan bidang keagamaan	100 %
9.	Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan	9.1	Jumlah Dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat	132 Kali
		9.2	Jumlah aparat kehumasan dan keprotokolan yang mengikuti diklat	17 Org.
		9.3	Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah :	110 Media
			- Media Masa	70 Media
			- Media cetak dan media luar ruangan	40 Media


 KUTENG, 20 JANUARI 2021
 SEKRETARIS DAERAH,

DRS. JAHANG FANSI ALDUS
 PEMBINA UTAMA MUDYA
 NIP. 19650726 199011 1 001

Lamp . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	1.1	Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	100 %
		1.2	Jumlah Desa Sadar Hukum	5 Desa
		1.3	Jumlah produk hukum yang ditetapkan :	340 Produk
			1. Peraturan Daerah	15 Perda
			2. Peraturan Bupati	20 Perbub
			3. Keputusan Bupati	300 SK
			4. Instruksi Bupati	5 Inst
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah	2.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Laporan Kinerja	100 %
		2.2	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP PD sampel	60 (B)
		2.3	Persentase PD yang telah menyusun LKpj dan LPPD	100 %
		2.4	Persentase penataan wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %
		2.5	Jumlah kecamatan yang mengadminis-trasikan pembakuan nama rupa bumi Kab. Manggarai	12 Kec.
		2.6	Persentase konflik masyarakat yang difasilitasi penyelesaiannya	100 %
3.	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	3.1	Persentase Perangkat Daerah yang Kelembagaannya telah sesuai dengan Anjab, ABK dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku	100 %
4.	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan	4.1	Persentase proyek yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		4.2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan adm. pembangunan dengan baik	100 %
		4.3	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu	100 %
5	Terwujudnya organisasi Pemuda yang partisipatif	5.1	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	11 Organ
		5.2	Jumlah organisasi olaharaga yang dibina	12 Organ
6.	Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakt penerima manfaat Raskin	6.1	Koordinasi pelaksanaan penyaluran Raskin bagi RTSPM di 171 Desa/Kel.	27.845 RTSPM
		6.2	Jumlah Pagu Beras	5.012.100 Kg.
7.	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflasi	7.1	Cakupan wilayah pengawasan wilayah terhadap peredaran barang dan jasa	41,67 %
		7.2	Laju Inflansi	6,32 %
8.	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	8.1	Cakupan upaya peningkatan kesehatan masyarakat	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
		8.2	Jumlah KIS yang diterbitkan	10.000 KIS
		8.3	Cakupan pelayanan bidang keagamaan	100 %
9.	Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan	9.1	Jumlah Dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat	132 Kali
		9.2	Jumlah aparat kehumasan dan keprotokolan yang mengikuti diklat	17 Org.
		9.3	Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah : - Media Masa - Media cetak dan media luar ruangan	110 Media 70 Media 40 Media

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	817.448.324,00	APBD-P
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.483.000,00	APBD-P
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	377.891.200,00	APBD-P
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	555.184.824,00	APBD-P
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	65.100.000,00	APBD-P
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	80.520.000,00	APBD-P
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.483.564.400,00	APBD-P
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA / ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.056.400.000,00	APBD-P
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	243.514.590,00	APBD-P
JUMLAH		14.880.106.338,00	APBD-P


BUKATI MANGGARAI,
HERYBERTUS G.L. NABIT, SE, MA

RUTENG, 23 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
DRS. JAHANG FANSI ALDUS
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19650726 199011 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	RELISASI	%
1	2	3		4	5	6
1.	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	1.1	Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	100 %	100,00	100,00
		1.2	Jumlah Desa Sadar Hukum	5 Desa	4	80,00
		1.3	Jumlah produk hukum yang ditetapkan :	340 Produk	503	147,94
			1. Peraturan Daerah	15 Perda	14	93,33
			2. Peraturan Bupati	20 Perbub	61	305,00
			3. Keputusan Bupati	300 SK	390	130,00
			4. Instruksi Bupati	5 Inst	38	760,00
		Rata-rata				109,31
		Kategori			MEMUASKAN	
		Kode				
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah	2.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Laporan Kinerja	100 %	100,00	100,00
		2.2	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP PD sampel	60 (B)	74,64 (BB)	124,40
		2.3	Persentase PD yang telah menyusun LKPj dan LPPD	100 %	100,00	100,00
		2.4	Persentase penataan wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %	100,00	100,00
		2.5	Jumlah kecamatan yang mengadminis-trasikan pembakuan nama rupa bumi Kab. Manggarai	12 Kec.	12	100,00
		2.6	Persentase konflik masyarakat yang difasilitasi penyelesaiannya	100 %	100,00	100,00
		Rata-rata				104,07
		Kategori			MEMUASKAN	
		Kode				
3.	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	3.1	Persentase Perangkat Daerah yang Kelembagaannya telah sesuai dengan Anjab, ABK dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku	100 %	100,00	100,00
		Rata-rata				100,00
		Kategori			MEMUASKAN	
		Kode				
4.	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi	4.1	Persentase proyek yang diselesaikan tepat waktu	100 %	96,96	96,96
		4.2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan adm. pembangunan dengan baik	100 %	95,92	95,92
		4.3	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu	100 %	98,50	98,50
		Rata-rata				97,13
		Kategori			SANGAT BAIK	
		Kode				
5	Terwujudnya organisasi Pemuda yang partisipatif	5.1	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	11 Organ	8	72,73

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	RELISASI	%
1	2	3		4	5	6
		5.2	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	12 Organ	14	116,67
		Rata-rata				94,70
		Kategori			SANGAT BAIK	
		Kode				
6.	Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat penerima manfaat Raskin	6.1	Koordinasi pelaksanaan penyaluran Raskin bagi RTSPM di 171 Desa/Kel.	27.845 RTSPM	26.718	95,95
		6.2	Jumlah Pagu Beras	5.012.100 Kg.	4.809.240	95,95
		Rata-rata				95,95
		Kategori			SANGAT BAIK	
		Kode				
7.	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflasi	7.1	Cakupan wilayah pengawasan wilayah terhadap peredaran barang dan jasa	41,67 %	41,67	100,00
		7.2	Laju Inflansi	6,32 %	0,39	193,83
		Rata-rata				146,91
		Kategori			MEMUASKAN	
		Kode				
8.	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	8.1	Cakupan upaya peningkatan kesehatan masyarakat	100 %	0,00	0,00
		8.2	Jumah KIS yang diterbitkan	10.000 KIS	23.631	236,31
		8.3	Cakupan pelayanan bidang keagamaan	100 %	0,00	0,00
		Rata-rata				78,77
		Kategori			BAIK	
		Kode				
9.	Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan	9.1	Jumlah Dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat	132 Kali	132	100,00
		9.2	Jumlah aparat kehumasan dan keprotokolan yang mengikuti Diklat	17 Org.	8	47,06
		9.3	Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah :	110 Media	57	51,82
			- Media Masa	70 Media	31	44,29
			- Media cetak dan media luar ruangan	40 Media	26	65,00
		Rata-rata				66,29
		Kategori			CUKUP	
		Kode				

RATA-RATA SASARAN 1 S/D 9

99,24

KATEGORI

SANGAT BAIK

KODE

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.	REALISASI	%
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	817.448.324	APBD-P	719.935.760	88,07
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	200.483.000	APBD-P	200.211.559	99,86
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	377.891.200	APBD-P	375.559.665	99,38
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	555.184.824	APBD-P	554.851.340	99,94
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	65.100.000	APBD-P	65.100.000	100,00
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	80.520.000	APBD-P	43.520.000	54,05

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RELISASI	%
1	2	3	4	5	6
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.483.564.400	APBD-P	11.343.893.440	98,78
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.056.400.000	APBD-P	1.055.460.939	99,91
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	243.514.590	APBD-P	241.691.750	99,25
JUMLAH		14.880.106.338	APBD-P	14.600.224.453	98,12

Batang, 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]

DR. JAHANG FANSTALDUS
PEMUDA UTAMA MADYA
NIP. 19650726 199011 1 001



**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM PER SASARAN
TAHUN 2021**

SASARAN		PROGRAM		ANGGARAN	REALISASI	%
No.	URAIAN	No.	NAMA PROGRAM			
1.	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	817.448.324,00	719.935.760,00	88,07
		Rata-rata		817.448.324,00	719.935.760,00	88,07
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	377.881.200,00	375.559.665,00	99,39
		2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	140.431.000,00	140.281.000,00	99,89
		Rata-rata		518.312.200,00	515.840.665,00	99,52
3.	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	60.052.000,00	59.930.559,00	99,80
		Rata-rata		60.052.000,00	59.930.559,00	99,80
4.	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan	1	Program Perekonomian dan Pembangunan	555.184.824,00	554.851.340,00	99,94
		Rata-rata		555.184.824,00	554.851.340,00	99,94
5.	Terwujudnya organisasi Pemuda yang partisipatif	1	Hanya melalui Koordinasi dengan Perangkat Daerah yaitu Dinas pendidikan dan KONI	0,00	0,00	0,00
		Rata-rata		0,00	0,00	0,00
6.	Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat penerima manfaat Raskin	1	Program Perekonomian dan Pembangunan	65.100.000,00	65.100.000,00	100,00
7.	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflasi					
		Rata-rata		65.100.000,00	65.100.000,00	100,00
8.	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	11.483.564.400,00	11.343.893.440,00	98,78
		2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80.520.000,00	43.520.000,00	54,05
		Rata-rata		11.564.084.400,00	11.387.413.440,00	98,47

9.	Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.299.914.590,00	1.297.152.689,00	0,00
		Rata-rata		1.299.914.590,00	1.297.152.689,00	99,79
	Jumlah Program Strategis			14.880.096.338,00	14.600.224.453,00	98,12
Rata-rata Capaian 9 Sasaran Tahun 2021 (Form Pengukuran Kinerja Tahun 2021)						99,24
Tingkat Efektivitas Anggaran terhadap Rata-rata Capaian 9 Sasaran						1,12

Surabaya, 15 Maret 2022

DAERAH

Drs. Jahang Fandi Aldus

PEMBAKUTAMA MADYA

NIP. 19650726 199011 1 001

LKIP 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Manggarai Maju, Adil dan Berlaya Saing

